

**PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL  
MADRASAH ALIYAH  
(Studi Kasus di Madrasah Aliyah Al-Fatah Badas Pare Kediri)  
Moh. Rois\***

**Abstract**

This research is held at Madrasah Aliyah Al-Fatah Badas Pare Kediri for : (1) to know the background and reasons on Madrasah Aliyah Al-Fatah manager in deciding the Islamic subject as a local content subject; (2) to describe about the adjustment of local-content curriculum with the needs of society in deciding the local-content curriculum; (3) to know and describe about the involvement of society in deciding the local-content curriculum; (4) to evaluate the implementation of local-content curriculum; and (5) to give the formulation of alternative local-content curriculum to Madrasah Aliyah Al-Fatah based on the findings of this study conceptually.

The instruments used to collect data in this study are interview with some informants as the subjects to obtain the main data, observation and documentation to gain the data about the instructional activities conducted by the teachers and the planning of local-content curriculum in file. Those data are then described in narration forms.

The findings of this study show that in general the region subject, as a local-content subject at Madrasah Aliyah Al-Fatah is appropriate with the needs of society. But, specifically this local-content subject needs to be developed, because the needs of society are changing. Besides, it is found that the found has not been involved yet optimally by madrasah in deciding the local-content curriculum. So the hopes of society are not included yet wholly. In addition, it is found that the implementation of local-content curriculum is not well. So there are some teaching rules which are not performed by the teachers in which the teachers only present the materials related to the religious activities in society without evaluating the success and failure.

It is concluded that practically there is a need of religion subjects related to the religious activities in society. The other is the need of subject related to the skillsfor jobs.

---

\* Staf pengajar di STAIN Kediri Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam

Therefore, it is suggested that the manager of Madrasah Aliyah Al-Fatah Badas should direct the development of local-content curriculum to the religion subjects related to the religious activities in society and the dsubject related to the skills of jobs as the provision after graduating from Madrasah Aliyah Al-Fatah Badas.

**Kata kunci** : Key words : Kurikulum Muatan Lokal dan Madrasah

## I

### **Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang**

Setelah diundangkannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka otonomi daerah menjadi isu nasional yang banyak dibicarakan orang terutama para pejabat pemerintahan. Keinginan setiap daerah untuk memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur daerahnya sendiri semakin mendekati kenyataan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut menimbulkan terjadinya pergeseran azas yakni dari azas desentralisasi yang di dalamnya termasuk bidang pendidikan.

Pada pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa:

Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendiikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.<sup>1</sup>

Dengan demikian berarti bidang pendidikan yng berkaitan dengannya termasuk kurikulum menjadi kewenangan daerah sehingga desentralisasi pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tersebut lebih mendekatkan kepada pokoknya, yaitu sekolah sekolah sebagai lembaga yang paling kompeten dalam opersionalisasi proses pendidikan. Dalam rangka implementasi desentralisasi pendidikan perlu ditemukan terobosan pemikiran agar proses pendidikan benar-benar sampai kepada tujuan idealnya, yaitu melayani kebutuhan siswa dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya serta kesesuaiannya dengan masyarakat setempat . Sekolah perlu diberikan ruang gerak yang luas untuk mengembangkan sayap dengan ide-ide serta gagasan-gagasan yang realistis. Dengan ruang gerak yang cukup, sekolah akan dapat kreatif dan bertanggung jawab mengelola

---

<sup>1</sup> Undang-Undang, Otonomi Daerah (Bandung : Kuraiko Pratama, 1999) 13

program-programnya secara efisien. Sekolah merupakan bagian penting dari masyarakat, maka sekolah hendaknya dapat mengupayakan pelestarian karakteristik atau kekhasan masyarakat sekitar sekolah itu berada. Untuk itu sekolah hendaknya dapat menyajikan program-program pendidikan yang dapat memberikan wawasan kekhasan daerahnya, baik yang berkaitan dengan kondisi alam, kondisi lingkungan sosial, budaya maupun kebutuhan daerah. Selain itu sekolah unit pelayanan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitarnya. Sallis (1993) dalam Samani menyatakan:

Sekolah seyogyanya dipahami sebagai unit layanan jasa pendidikan dan bukan sebagai kepanjangan birokrasi pemerintah. Sebagai unit layanan jasa, maka keberhasilan sekolah harus diukur dari "kepuasan" kliennya, yaitu siswa dan orang tua. Bahwa kepuasan klien berkorelasi dengan kualitas produk/layanan memang benar, tetapi mutu dan produk/ layanan itu akan sangat relatif tergantung karakteristik klien. Klien dengan karakteristik berbeda akan memerlukan kualitas layanan yang berbeda pula. Oleh karena itu dalam pendidikan, siswa hendaknya diperlakukan sebagai klien utama yang dilayani dan bukan "subyek" yang mengikuti kehendak sekolah.<sup>2</sup>

Untuk mencapai itu semua sekolah dalam menyajikan program pendidikan memerlukan sistem pengembangan program pendidikan atau kurikulum yang bersifat desentralisasi. Dalam mengembangkan sekolah ke depan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terobosan melalui pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi sangat diperlukan.

Selama ini kurikulum yang berlaku di sekolah bersifat sentralisasi dimana seluruh peserta didik di negeri ini dianggap sama dan diberikan pelayanan yang sama, metode yang sama dan media yang sama pula, sehingga ujian akhir pun dengan bentuk materi dan bobot yang sama pula, yaitu dengan pola EBTANAS tanpa memperhatikan keragaman wilayah/ daerah serta kelemahannya. Sukmadinata mengemukakan kelemahan kurikulum sentralisasi, antara lain:

Penyeragaman dapat menghambat kreativitas, dapat memperlambat kemajuan sekolah yang sudah mapan dan menyeret perkembangan sekolah yang masih terbelakang. Penyeragaman yang terlalu jauh dari kondisi dan sifat wilayah akan menghambat kepesatan perkembangan wilayah tersebut. Bagi sekolah-sekolah yang kebetulan hasilnya sangat baik dapat menimbulkan sikap kecongkakan, sedangkan bagi sekolah yang berhasil

---

<sup>2</sup> Samani, Muchlas, *School Based Management : Strategi Pemberdayaan Sekolah Dalam Rangka Desentralisasi Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Berkualitas* (Malang, UM, 1999) 5

sangat jelek akan mengakibatkan rendah diri, di samping adanya cemoohan dari berbagai pihak.<sup>3</sup>

Pada lembaga pendidikan, kurikulum harus dituangkan dalam bentuk tertulis secara jelas karena kurikulum berfungsi sebagai arah untuk menuju pada tujuan yang ingin di capai. Hal-hal yang semestinya di ketahui oleh peserta didik maupun yang semestinya diajarkan oleh guru kepada peserta didik seyogyanya dijabarkan dalam kurikulum dengan tepat.

Pengelolaan dan perencanaan kurikulum yang dinamis dalam sistem pendidikan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai materi atau bahan pelajaran serta cara/metode yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar pada suatu jenjang pendidikan formal atau non formal. Orientasi kurikulum seperti ini di maksudkan untuk memenuhi tuntutan kemajuan hidup manusia tuntutan kemajuan hidup manusia di masa depan di mana keseimbangan dan keselarasan menjadi sentral pola kehidupan yang ideal.

Selanjutnya kurikulum yang sedang berlaku di sekolah-sekolah sekarang adalah kurikulum 1994 yang dibarengi dengan suplemen (1999). Bila ditinjau secara filosofis kurikulum 1994 sangat memberi perhatian kepada proses pembelajaran yang dinamik, sehingga proses dan produk selayaknya diterjemahkan secara kreatif dan kontekstual. Pada perancang kurikulum 1994 disamping memberikan muatan nasional juga memberikan materi muatan lokal yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat/lingkungan sekolah masing-masing.

Melihat keanekaragaman adat istiadat, budaya daerah serta karakteristik lingkungan sekolah, maka setiap sekolah dalam memberikan muatan lokal terjadi perbedaan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, meskipun dalam satu wilayah propinsi maupun kabupaten. Dengan demikian muncullah beraneka ragam mata pelajaran yang ditawarkan pada sekolah yang berbeda. Oleh karena itu kurikulum yang diberlakukan di sekolah mencakup kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 pada pasal 38.

Suwandi menjelaskan : Kurikulum nasional adalah kurikulum yang isi dan bahan pelajarannya ditetapkan secara nasional. Sedangkan kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang isi dan bahan pelajarannya

---

<sup>3</sup> Sukmadinata, Mana Syaodih, *Prinsip dan Landasan Pengembangan Kurikulum* (Jakarta, Dirjen Dikti, P2LPTK, 1988) 217

diambil dan ditetapkan oleh daerah, sesuai dengan keadaan lingkungan alam, sosial, ekonomi, dan budaya serta kebutuhan pembangunan daerah.<sup>4</sup>

Dari pernyataan di atas jelas bahwa kurikulum yang diberlakukan oleh pemerintah secara nasional mengandung peluang untuk diberikan muatan lokal yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan tempat sekolah itu berada. Dari situ pula lahir materi muatan lokal yang sekarang terkenal dengan sebutan kurikulum lokal (kurlok) yang diajarkan di sekolah yang lain pada daerah atau lingkungan yang berbeda dengan prinsip relevansi, yakni yang tercakup dalam kurikulum mempunyai kaitan dengan tuntutan, kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Mengenai kriteria lingkungan atau masyarakat dan mengingat pola kehidupan masyarakat, maka Depdikbud secara mendasar membagi pola kehidupan masyarakat itu ke dalam 8 (delapan) bagian yaitu : (1) perikanan darat atau perikanan laut; (2) peternakan; (3) persawahan; (4) perladangan dan perkebunan; (5) perdagangan, termasuk didalamnya jasa; (6) industri kecil, termasuk industri rumah tangga dan kerajinan; (7) industri besar; dan (8) pariwisata.

Berdasarkan delapan pola kehidupan masyarakat ini dapat dijadikan acuan-ancang atau pertimbangan bagi sekolah dalam menerapkan muatan lokal sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang terlalu jauh.

Madrasah Aliyah "Al-Fatah" Badas-Pare sejak berdiri pada tanggal 1 Agustus 1984 sampai sekarang telah menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan tidak seperti kebiasaan perkembangan madrasah di desa pada umumnya. Tujuan didirikannya Madrasah di desa pada umumnya. Tujuan didirikannya Madrasah Aliyah Al-Fatah sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris pendirian Yayasan Pendidikan Al-Fatah (YPA) pasal 4 yang menyebutkan sebagai berikut : (1) membantu program pemerintah dalam pembangunan nasional khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran; (2) tegak dan tumbuh suburnya penghayatan dan pengamalan ajaran Islam ala ahlu sunnah wal jama'ah wan nahdliyah dalam praktek kehidupan masyarakat; (3) terbentuknya pribadi-pribadi manusia yang berbudi luhur, bertaqwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, berpendidikan cukup, berpengetahuan dan berpandangan luas, terampil, cakap serta bertanggung jawab dalam mengemban dan mengamalkan ilmu pengetahuannya dalam praktek kehidupan sehari-hari; (4) terbina dan terpeliharanya kemaslahatan dan kesejahteraan kehidupan umat dalam mengabdikan diri kepada Allah SWT, pada bangsa dan negara;

---

<sup>4</sup> Suwandi, Muatan Lokal : Menyusun dan Melaksanakannya di Daerah, Suara Guru (9)  
11

dan (5) terbentuk dan terwujudnya suatu masyarakat yang adil makmur lahir bathin dan diridlai Allah SWT.

Dengan status *Diakui* berdasarkan surat Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor : 25/E.IV/PP.03.2/KEP/III/1997 tanggal 13 Maret 1997, maka madrasah ini cukup diminati oleh masyarakat Badas dan masyarakat sekitarnya secara luas sehingga setiap tahun ajaran baru peminat selalu melebihi daya tampung yang ada. Dalam proses pembelajaran, di madrasah ini menggunakan kurikulum nasional 1994 dan juga memberikan kurikulum lokal yang dirancang sendiri oleh sekolah yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Kurikulum nasional 1994 untuk mensiasati kebutuhan ujian negara yang diadakan oleh pemerintah. Sedangkan kurikulum lokal yang dirancang sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan ternyata kurikulum lokal Madrasah Aliyah Al-Fatah Badas berbeda dengan madrasah-madrasah yang lain. Perbedaan ini dimana materi/isi kurikulum muatan lokal di madrasah ini difokuskan pada mata pelajaran agama. Selain itu sejak diberlakukannya kurikulum muatan lokal di madrasah ini sampai sekarang belum pernah diadakan peninjauan kembali meskipun kondisi dan kebutuhan masyarakat telah mengalami perubahan.

Dari fenomena tersebut cukup menarik untuk diadakan penelitian di Madrasah Aliyah Al-Fatah ini berkaitan dengan keberadaan kurikulum Madrasah Aliyah yang memberikan kurikulum muatan lokal cukup banyak dan muatan lokal yang ditetapkan terfokus pada bidang agama. Apakah benar bahwa pelajaran-pelajaran agama masih dibutuhkan oleh masyarakat sehingga banyak orang tua yang menyekolahkan putra putrinya di Madrasah Aliyah Al-Fatah ini. Dan apakah materi muatan lokal yang telah ditetapkan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berangkat dari fenomena dan pertanyaan tersebut, maka penelitian ini mengangkat judul "PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL MADRASAH ALIYAH" dengan mengambil Kasus di Madrasah Aliyah Al-Fatah Badas.

## **B. Fokus Penelitian**

Beranjak dari latar belakang dan fenomena tersebut di atas, maka penelitian ini akan memfokuskan pada aspek pengembangan muatan lokal dalam kaitannya dengan kebutuhan masyarakat setempat dan selanjutnya dirumuskan ke dalam beberapa masalah. Selanjutnya rumusan masalah dalam penelitian ini dijabarkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih rinci sebagai berikut :

1. Mengapa Madrasah Aliyah Al-Fatah Badas memfokuskan isi/materi kurikulum muatan lokal pada bidang keagamaan saja?
2. Apakah materi muatan lokal yang terfokuskan pada pelajaran agama tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat/lingkungan setempat?
3. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kurikulum muatan lokal di Madrasah Aliyah Al-Fatah Badas?
4. Bagaimana pelaksanaan kurikulum muatan lokal di Madrasah Aliyah Badas?

### **C. Tujuan Penelitian**

Seperti dijelaskan di atas bahwa tujuan dari penelitian adalah untuk menjawab dan sekaligus memecahkan masalah yang belum terpecahkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mendeskripsikan latar belakang pemikiran atau alasan-alasan dari pihak pengelola madrasah berkaitan dengan terfokusnya bidang keagamaan dalam kurikulum muatan lokal pada Madrasah Aliyah Al-Fatah Badas.

Untuk mendeskripsikan kesesuaian materi kurikulum lokal yang diajarkan di Madrasah Aliyah Al-Fatah Badas dengan potensi dan kebutuhan masyarakat/lingkungan setempat.

Untuk mendeskripsikan sejauh mana keterlibatan masyarakat baik tokoh masyarakat maupun orang tua siswa dalam penetapan/penyusunan kurikulum muatan lokal pada Madrasah Aliyah Al-Fatah Badas.

Untuk mengetahui dan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan kurikulum lokal di Madrasah Aliyah Al-Fatah Badas.

Untuk merumuskan desain kurikulum muatan lokal alternatif secara konseptual.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan masukan dalam pengembangan kurikulum muatan lokal di Madrasah Aliyah Al-Fatah khususnya dan Madrasah Aliyah yang lain pada umumnya.
2. Untuk memberikan desain kurikulum muatan lokal alternatif secara konseptual kepada pihak pengelola Madrasah Aliyah Al-Fatah Badas.
3. Untuk memberikan nasehat kebijakan lembaga pendidikan yang bersangkutan dalam mengembangkan kurikulum muatan lokal lebih lanjut.

### **Konsep Kurikulum Muatan Lokal**

Berbagai definisi tentang kurikulum muatan lokal telah banyak disampaikan para paka dengan beranekaragaman. Keanekaragaman tersebut dikarenakan pengalaman dan latar belakang yang berbeda-beda. Untuk mengkaji hal tersebut di bawah ini dikemukakan beberapa pendapat para ahli dan institusi pemerintah mengenai pengertian kurikulum muatan lokal sebagai berikut :

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam surat keputusannya No. 0412/U/1987 (1987:5) dijelaskan bahwa “Muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dan penyampaian dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah dan wajib dipelajari oleh murid didaerah itu”<sup>5</sup>

Ibrahim dan Karyadi menyatakan bahwa kurikulum muatan lokal adalah “Pengembangan bahan pelajaran yang materinya berupa benda-benda mahluk hidup, kejadian atau peristiwa alam, budaya yang ada dalam lingkungan geografis, sosial dan budaya tertentu”.<sup>6</sup>

Menurut Utomo dkk memberikan pengertian tentang kurikulum muatan lokal sebagai berikut : “Kurikulum muatan lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang ditetapkan oleh daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing.”<sup>7</sup>

Suwandi mengemukakan bahwa : Muatan lokal pada intinya berupa pelajaran dan pengenalan berbagai keterampilan dan kerajinan tradisional, tetapi juga berbagai manifestasi kebudayaan daerah, seperti bahasa daerah, legenda, dan adat istiadat.”<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Syarif bahwa “Muatan lokal merupakan sejumlah mata pelajaran tambahan sebagai kesatuan program pengajaran jenjang pendidikan tertentu, yang isi sajiannya disesuaikan dengan keadaan lingkungan atau kebutuhan setempat dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan tanpa mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional.”<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Mendikbud, *Surat Keputusan*, (1987) 5

<sup>6</sup> Ibrahim dan Karyadi, *Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta : Depdikbud, Dirjen Dikti, 1990) 30

<sup>7</sup> Erry Utomo dkk, *Pokok-Pokok Pengertian dan Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal*. (Jakarta : Depdikbud, 1997) 1

<sup>8</sup> Suwandi, Hamid, Muatan Lokal, *Suara Guru* (9) 11-13

<sup>9</sup> Syarif, Hamid, *Mengenal Kurikulum Sekolah dan Madrasah*, (Bandung, Citra Umbara, 1995)



Bertitik tolak dari beberapa definisi di atas yang telah disampaikan oleh para pakar, meskipun berbeda-beda redaksi, namun mempunyai kesamaan maksud, yakni kesesuaiannya materi muatan lokal dengan kebutuhan lingkungan daerah setempat sekolah itu berada serta kesesuaiannya dengan pembangunan daerah dengan tidak mengesampingkan pembangunan nasional. Dengan kata lain bahwa kebutuhan daerah dalam arti luas maupun sempit dapat terpenuhi dengan program-program yang dilakukan sekolah, sehingga output suatu sekolah tidak asing lagi ketika terjun di masyarakat/lingkungannya masing-masing.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis berpegang pada kurikulum muatan lokal dalam pengertian sejumlah mata pelajaran yang disajikan oleh sekolah yang dianggap kelak lebih bermanfaat sebagai bekal siswa untuk terjun di masyarakat/lingkungannya. Oleh karena itu penetapan kurikulum muatan lokal sebenarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab penuh sekolah dan masyarakat sekitarnya secara mandiri tanpa adanya intervensi dari pihak luar.

### **Tujuan Kurikulum Muatan Lokal**

Diberlakukannya kurikulum muatan lokal sebagai implementasi dari pasal 37 dan 38 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara bertahap dimaksudkan untuk memberikan pendidikan yang lebih menyentuh kepada karakteristik bangsa Indonesia secara *holistik*. Berangkat dari keanekaragaman budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia yang berlaku di masyarakat, kurikulum muatan lokal diharapkan mampu menjembatani antara kebutuhan masyarakat melalui program-program sekolah. Secara rinci tujuan kurikulum muatan lokal di sekolah sebagai berikut :

Secara umum, menurut Sutardi menyebutkan bahwa tujuan pengajaran muatan lokal ialah untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan perilaku kepada siswa agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai/ aturan yang berlaku di daerahnya dan mendukung pelestarian pembangunan daerah serta pembangunan nasional. Secara khusus pengajaran muatan lokal bertujuan agar siswa : (1) mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budayanya; (2) memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya; (3) memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai/aturan-aturan yang berlaku di daerahnya serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat

dalam rangka menunjang pembangunan nasional.<sup>10</sup>Tujuan tersebut di atas sejalan dengan tujuan muatan lokal yang disampaikan oleh Utomo dkk dalam bukunya “Pokok-Pokok Pengertian dan Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal” sebagai berikut : (1) mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial dan budayanya; (2) memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya; dan (3) memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional.<sup>11</sup>

Suwandi menyatakan ada tiga pokok tujuan kurikulum muatan lokal, yaitu : (1) memperkenalkan siswa terhadap lingkungan, ikut melestarikan budaya termasuk kerajinan, keterampilan yang dijunjung tinggi, terutama yang menghasilkan nilai ekonomis tinggi di daerah tersebut; (2) memberikan bekal kemampuan dan keterampilan siswa yang kelak dapat menjadi bekal untuk hidup di masyarakat dan melanjutkannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan (3) memberikan bekal kepada siswa agar dapat menolong dirinya sendiri dan membantu orang tuanya memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>12</sup>

Bila dicermati dari tujuan kurikulum muatan lokal seperti yang telah disampaikan oleh para ahli tersebut di atas maka sebenarnya tujuan dari kurikulum muatan lokal adalah usaha untuk menjadikan murid agar mampu hidup ditengah-tengah masyarakat dan dapat menyesuaikan diri serta mampu memenuhi hajat hidup di masyarakat/lingkungan tempat tinggal. Sejalan dengan konsep tujuan di atas, Mulyasa menyatakan bahwa “kurikulum muatan lokal terdiri dari beberapa mata pelajaran yang berfungsi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menumbuhkembangkan pengetahuan dan kemampuannya sesuai keadaan dan kebutuhan lingkungan.”<sup>13</sup>

### **Materi Kurikulum Muatan Lokal Madrasah Aliyah**

Dalam sejarah perjalanannya, Madrasah Aliyah banyak mengalami perubahan baik dari sisi nama maupun karakteristiknya. Pada awalnya Madrasah Aliyah mempunyai ciri khas yang berbeda dengan sekolah umum, yaitu pola pengajarannya yang menggunakan kitab kuning klasik dan menjadikan pelajaran agama sebagai pelajaran inti. Namun dalam

---

<sup>10</sup> Sutardi, Ambari. Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal SLTP di Propinsi Lampung, *Korpri*,(1997) 26-29

<sup>11</sup> Utomo, *Pokok-Pokok* (Jakarta: Depdikbud, 1997) 6

<sup>12</sup> Suwandi, *Muatan Lokal* (9) 11-13

<sup>13</sup> Mulyasa, Karakteristik dan Implementasi Kurikulum Muatan Lokal dalam Kaitannya dengan Perkembangan Masyarakat, *Ilmu Pendidikan*, XXV (2) 1998. 179-189

perkembangannya, Madrasah Aliyah melakukan berbagai inovasi termasuk di bidang kurikulum.

Berdasarkan SKB tiga menteri tanggal 24 Maret 1975 No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975, No. 36 tahun 1975 sebagai pelaksana dari keputusan Presiden No. 34 tahun 1972, Instruksi Presiden No. 15 tahun 1974 agar mata pelajaran umum di madrasah mencapai tingkatan yang sama dengan tingkatan pelajaran umum di Sekolah Umum yang setingkat. Mulai saat itulah maka muatan pelajaran agama pada kurikulum Madrasah Aliyah mengalami penyesuaian, yaitu menjadi 30% pelajaran agama dan 70% memuat pelajaran umum.

Atas dasar itu, maka pelajaran agama di Madrasah Aliyah mulai mengalami penyusutan. Dalam perkembangan kurikulum selanjutnya, yaitu kurikulum 1984 tidak banyak mengalami perubahan. Namun pada saat diberlakukannya kurikulum 1994 sampai saat ini, muatan pelajaran agama di Madrasah Aliyah mengalami penyusutan kembali sehingga tinggal sekitar 17%. Meskipun demikian dari sisi baiknya bahwa kurikulum 1994 memberikan peluang diajarkannya muatan lokal di setiap sekolah yang dipilih dan ditentukan sendiri oleh pihak sekolah yang bersangkutan. Sudjana menyatakan bahwa isi/materi kurikulum berkenaan dengan pengetahuan ilmiah dan pengalaman belajar yang harus diberikan kepada siswa untuk dapat mencapai kegiatan pendidikan. Selanjutnya dalam menentukan materi kurikulum baik yang berkenaan dengan pengetahuan ilmiah maupun pengalaman belajar disesuaikan dengan tingkat dan jenjang pendidikan, perkembangan yang terjadi dalam masyarakat yang menyangkut tuntutan dan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>14</sup>

Melihat perubahan kurikulum Madrasah Aliyah yang demikian itu kiranya perlu dicermati agar Madrasah Aliyah tidak kehilangan identitasnya semula. Oleh karena itu, dalam menetapkan pelajaran atau materi kurikulum muatan lokal perlu dipertimbangkan masak-masak sebab bagaimanapun Madrasah Aliyah adalah termasuk lembaga pendidikan Islam yang mempunyai kekhasan sendiri. Mengenai materi kurikulum pada umumnya dan kurikulum muatan lokal khususnya di Madrasah Aliyah sebagai lembaga pendidikan Islam kiranya perlu dipertimbangkan kekhasan dari madrasah tersebut.

Al-Gazali dalam Jalaluddin dan Said menekankan unsur-unsur keilmuan yang berhubungan masalah-masalah agama yang menjadi materi kurikulum dalam pendidikan Islam pada zamannya. Secara garis besarnya

---

<sup>14</sup> Sudjana, Nana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah* (Bandung: Sinar Baru, 1996) 27

ia menekankan agar materi kurikulum meliputi empat kelompok, yakni : (1) ilmu-ilmu yang wajib dipelajari oleh perorangan seperti ulum Al-Qur'an, ulum Al-Hadis, Fiqih dan Tafsir; (2) ilmu yang berguna bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia seperti ilmu kedokteran, matematika, teknologi, politik dan lainnya; (3) ilmu yang tergolong ilmu penunjang seperti tata bahasa (nahwu) dan cabang-cabangnya; dan (4) ilmu yang berkaitan dengan kebudayaan seperti kesusasteraan, sejarah, dan cabang-cabangnya. Oleh karena itu selanjutnya Al-Ghazali mengusulkan beberapa ilmu pengetahuan yang dipelajari di sekolah sebagai berikut : (1) ilmu Al-Qur'an dan ilmu agama seperti Fiqih, Hadis dan Tafsir; (2) sekumpulan bahasa, nahwu dan mahraj srta lafadz-lafadznya; (3) ilmu-ilmu yang fardu kifayah seperti ilmu kedokteran, matematika, teknologi dan sejenisnya; dan (4) ilmu kebudayaan seperti syair, sejarah dan beberapa cabang filsafat.<sup>15</sup>

Sejalan dengan pendapat Al-Ghazali tersebut, Al-Jamaly dalam Jalaluddin dan Said menyarankan agar dalam kurikulum pendidikan Islam berisikan materi yang dikehendaki oleh Al-Qur'an ayng meliputi : ilmu agama, sejarah, falak, ilmu bumi dan disiplin ilmu yang bermanfaat bagi pengembangan potensi umat manusia dalam mempertinggi derajat dan martabatnya.<sup>16</sup>

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis ilmu tersebut yang selayaknya dijadikan substansi kurikulum lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah Aliyah yang bentuknya dapat dimodifikasi, formulasi ataupun penyempurnaan-penyempurnaan sesuai dengan tuntutan masyarakat setempat, mengingat lembaga pendidikan merupakan cermin dari cita-cita masyarakatnya.

Secara garis besar materi kurikulum lembaga pendidikan Islam (yang didalamnya Madrasah Aliyah) hendaknya termuat adanya unsur-unsur : (1) keagamaan; (2) ketauhidan; (3) pengembangan potensi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi; (4) pengembangan hubungan antar manusia; dan (5) pengembangan diri sebagai individu. Dengan kata lain bahwa materi kurikulum lembaga pendidikan Islam yang baik adalah yang bersifat integrated dan komprehensif, yakni yang mencakup ilmu agama dan umum.

---

<sup>15</sup> Jalaluddin dan Usman Said, *Filsafat Pendidikan Konsep dan Perkembangan Pemikirannya*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997) 50

<sup>16</sup> Ibid, 51

### **Keterlibatan Masyarakat dalam Penetapan Kurikulum Muatan Lokal**

Masyarakat merupakan bagian penting dari sekolah yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dengan sekolah. Sekolah berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan pada akhirnya kembali untuk masyarakat. Produk yang dihasilkan oleh sekolah setelah melalui proses akan kembali ke masyarakat dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu agar apa yang dihasilkan oleh sekolah dapat bermanfaat dan berdayaguna di masyarakat, maka perlu keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan. Kurikulum muatan lokal yang diharap dapat menjembatani antara sekolah dengan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaannya seyogyanya melibatkan peran masyarakat secara aktif.

Tujuan pengajaran muatan lokal dapat dicapai secara optimal jika ada prakarsa dari kepala sekolah sebagai top manajer, para guru sebagai pelaksana kurikulum muatan lokal dan unsur-unsur masyarakat di lingkungan sekolah yang bersangkutan. Hal ini berarti perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat demi kelancaran dan keberhasilan pengajaran muatan lokal. John M. Cohn (1997) dalam Subandijah menjelaskan bahwa "Partisipasi adalah keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan, dan mengevaluasi program".<sup>17</sup> Senada dengan pendapat John M. Cohn di atas Dusseldorp masih dalam Subandijah "Partisipasi diartikan sebagai kegiatan atau keadaan mengambil bagian dalam suatu aktivitas untuk mencapai kemanfaatan secara optimal".<sup>18</sup>

Selanjutnya Dusseldorp mengklasifikasikan masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan sebagai berikut : (1) *Members of local community: a) local residents; b) local leaders;* (2) *Government personal: a) resident in the community; b) non resident;* (3) *Outsiders: a) resident in the community; b) non resident;* (4) *The elected representatives of the community.* Sedangkan John M. Cohn mengklasifikasikan masyarakat berdasarkan latar belakang dan tanggung jawabnya, yaitu : (1) penduduk setempat; (2) pemimpin masyarakat; (3) pegawai pemerintah; (4) pegawai asing yang memungkinkan dipertimbangkan apabila berarti dalam suatu aktivitas.

Berdasarkan pengklasifikasian di atas, dalam kaitannya dengan penelitian ini tentang anggota masyarakat yang dapat dilibatkan dalam suatu kegiatan persekolahan (dalam hal penyusunan dan pelaksanaan

---

<sup>17</sup> Subandijah, Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Muatan Lokal di Sekolah Dasar se Jawa Tengah, *Kependidikan XXII* (1) 33

<sup>18</sup> Ibid, 33

kurikulum muatan lokal) dimungkinkan terdiri dari : (1) aparat desa/ kepala desa setempat; (2) tokoh masyarakat/ ulama; (3) pimpinan organisasi kemasyarakatan; (4) pendidik; dan (5) orang tua siswa. Dari tokoh-tokoh masyarakat ini akan dimintai informasi tentang sekitar masalah yang berkaitan dengan keterlibatan mereka dalam pengembangan kurikulum muatan lokal di Madrasah Aliyah Al-Fatah Badas serta masalah lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, di mana penelitian ini akan mendeskripsikan hasil penelitian yang berupa kata-kata yang diperoleh selama mengadakan pengamatan dan wawancara dengan sejumlah informan. Menurut Bodgan dan Taylor dalam Moleong dikatakan bahwa “metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”<sup>19</sup>.

Morse dalam Bambang membedakan membedakan penelitian kualitatif menjadi 5 (lima) yaitu : (1) Fenomenologi; (2) Etnografi; (4) Etno-metodologi; dan (5) Etologi kualitatif.<sup>20</sup>

Berdasarkan beberapa metode/ strategi penelitian etnografi karena penelitian yang peneliti lakukan ini adalah metode/ strategi penelitian etnografi karena penelitian ini ingin mengungkap tentang keyakinan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dalam kaitannya dengan pengembangan kurikulum muatan lokal di Madrasah Aliyah al-Fatah Badas.

Adapun jenis penelitian yang peneliti lakukan dilakukan ini adalah jenis penelitian kasus karena penelitian ini dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi atau lembaga tertentu, yaitu Madrasah Aliyah Al-Fatah Badas pada fokus pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, kesimpulan atau hasil dari penelitian ini hanya berlaku pada Madrasah Aliyah Al-Fatah Badas saja dan tidak dapat digeneralisasikan pada Madrasah Aliyah yang lain.

### **Kehadiran Peneliti**

Karena penelitian ini mengangkat masalah pengembangan kurikulum muatan lokal tentu penelitian ini mengangkat masalah

---

<sup>19</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000) 3

<sup>20</sup> Bambang, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Malang, UM, 1999) 9

pengembangan kurikulum muatan lokal tentu penelitian ini akan melibatkan sejumlah pengelola madrasah yakni pengurus yayasan, kepala madrasah, wakasek madrasah bidang kurikulum, para guru yang mengajar muatan lokal, siswa, tokoh masyarakat dan orang tua siswa yang patut dijadikan informan. Selain itu juga melibatkan pihak luar, yakni guru STM/SMK Jombang untuk memberikan pertimbangan dalam penyusunan kurikulum muatan lokal alternatif pada Madrasah Aliyah Al-Fatah Badas setelah ditemukan kebutuhan masyarakat nantinya. Mengingat keberadaan masyarakat yang berbeda-beda tempat tinggal dan tingkat sosial ekonominya, maka kehadiran peneliti akan menyesuaikan dengan waktu dan kesiapan informan informan. Sedangkan yang berhubungan dengan madrasah akan dilakukan pada siang hari pada jam sekolah selama tidak mengganggu kegiatan madrasah. Adapun penelitian ini direncanakan akan dimulai pada bulan Januari 2002 sampai dianggap ini cukup/ selesai.

### **Data dan Sumber Data**

Data dalam penelitian ini berupa pendapat dan alasan pemikiran para pengelola Madrasah Aliyah Al-Fatah yang disampaikan kepada peneliti saat terjadi peneliti wawancara yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan kurikulum muatan lokal. Selain juga pendapat dari tokoh masyarakat dan orang tua siswa yang berkenaan dengan harapan dan kesesuaiannya kurikulum muatan lokal dengan kebutuhan masyarakat serta dari sejumlah siswa yang berkenaan dengan harapan dan kesesuaiannya kurikulum muatan lokal dengan kebutuhan masyarakat serta dari sejumlah siswa untuk mengetahui kebutuhan siswa yang berkaitan dengan bakat peserta didik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sejumlah siswa untuk mengetahui kebutuhan informan yang dijadikan subyek dalam penelitian ini, baik informan yang berasal dari pihak pengelola madrasah maupun informan yang berasal dari pihak masyarakat . Informan dari pihak pengelola madrasah terdiri dari pengurus yayasan, kepala madrasah, wakil kepala madrasah bidang kurikulum, guru bidang studi muatan lokal, sejumlah siswa dan yang lain yang dapat memberikan penjelasan sekitar pengembangan kurikulum lokal di Madrasah Aliyah Al-Fatah Badas dan apa sesungguhnya yang diharapkan oleh masyarakat terhadap madrasah ini. Informan dari masyarakat ini terdiri tokoh agama/ ulama, tokoh masyarakat, kepala pemerintahan desa, pimpinan organisasi massa dan pemerhati terhadap pendidikan. Selain itu juga terdiri dari sejumlah orang tua siswa yang dianggap mampu memberikan informasi tentang kurikulum sekolah.

## **Prosedur**

Prosedur yang ditempuh untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian menggunakan teknik *snow ball sampling* yaitu dengan menjadikan informan pertama sebagai petunjuk untuk menuju pada informan selanjutnya. Kongkritnya, kepala madrasah atau wakil kepala madrasah bidang kurikulum dapat menunjukkan kepada peneliti terhadap tokoh masyarakat dan orang tua siswa serta sejumlah siswa yang dianggap dapat mewakili siswa secara keseluruhan yang dapat dijadikan informan selanjutnya yang dianggap mampu memberikan penjelasan seputar pengembangan kurikulum muatan lokal di Madrasah Aliyah Al-Fatah Badas, begitu seterusnya sampai pada informan terakhir. Sebagai studi kualitatif (*qualitative research*) maka data yang dikumpulkan dalam studi ini berupa berupa yang dikumpulkan dalam studi ini berupa data kualitatif yang berupa kata-kata dan penjelasan dari sejumlah informan yang dijadikan subyek dalam penelitian ini.

Karena jenis penelitian ini kualitatif, maka tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (*in depth interview*), pengamatan partisipasi (*participatory observation*) dan dokumenter (*documenter*).

Selanjutnya dalam wawancara ini peneliti menggunakan jenis wawancara dengan pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara dan jenis wawancara baku terbuka. Pada jenis pertama dalam melakukan wawancara dengan informan peneliti berpatokan pada garis besar wawancara yang dibuat sebelumnya yang tidak terikat dengan urutan pertanyaan ataupun kata-kata yang dibuat. Jenis ini digunakan untuk mewawancarai informan dari pihak madrasah yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Sedangkan jenis yang kedua, penelitian dalam berwawancara dengan informan menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Kata-kata yang digunakan dalam pertanyaan yang di tanyakan sama untuk setiap informan. Jenis ini peneliti lakukan bagi informan dari masyarakat mengingat jumlahnta yang sangat cukup.

Kegiatan wawancara dalam penelitian ini di lakukn peneliti kepada:

a. Pengurus Yayasan dan pihak madrasah.

Wawancara dengan pengurus yayasan, kepada madrasah dan wakil kepala madrasah bagian kurikulum ini akan di gali data-data tentang : (a) latar belakang ditetapkannya bidang agama sebagai pelajaran muatan lokal ; (b) budaya dan pola kehidupan masyarakat Badas dan sekitarnya; (c) proses pengambilan keputusan dalam penetapan kurikulum muatan lokal; (d) keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan penetapan kurikulum muatan lokal; (e) relevansinya kurikulum muatan lokal



dengan kebutuhan masyarakat; dan (f) pelaksanaan kurikulum muatan lokal.

b. Tokoh masyarakat dan orang tua siswa

Wawancara dengan sejumlah tokoh masyarakat ini dilakukan untuk menggali data-data tentang : (a) tanggapan masyarakat tentang pelajaran agama yang dijadikan sebagai pelajaran muatan lokal; (b) pola kehidupan masyarakat; (c) kebutuhan masyarakat (d) kesesuaiannya kurikulum muatan dengan kebutuhan masyarakat ; dan (e) harapan-harapan masyarakat madrasah ke depan.

c. Siswa

Wawancara dengan sejumlah siswa ini dilakukan untuk menggali data-data tentang : (a) minat dan bakat siswa; (b) kebutuhan-kebutuhan siswa yang terkait dengan kurikulum muatan lokal; dan (c) pelaksanaan kurikulum muatan lokal di kelas.

Selanjutnya observasi dilakukan peneliti terhadap sejumlah guru yang mengajarkan pelajaran muatan lokal. Observasi ini untuk menggali data tentang: persiapan mengajar guru baik yang tertulis maupun tidak tertulis, cara menyampaikan pelajaran kepada peserta didik, penggunaan alat pengajaran yang baik serta bagaimana mengadakan evaluasi terhadap materi yang diajarkan kepada peserta didik. Pada prinsipnya observasi ini dilakukan untuk mengamati langsung selama proses belajar mengajar berlangsung di kelas.

Sedangkan dokumentasi dipergunakan untuk menggali data tentang : petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis kurikulum muatan lokal, rancangan kurikulum muatan lokal yang sedang diberlakukannya serta persiapan tertulis yang oleh guru sebelum mengajar.

### **Pengecekan Keabsahan Data**

Untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, maka seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber melalui beberapa teknik pengumpulan data diadakan pengecekan terhadap keabsahan.

Dalam penelitian ini peneliti dalam pengecekan data menggunakan cara triangulasi data, yaitu membandingkan data yang di peroleh dari satu sumber dengan sumber yang lain. Dalam penelitian kualitatif kegiatan ini berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang akhirnya sampai dipastikan data yang valid.

### **Analisis Data**

Langkah penting kegiatan penelitian sebelum sampai kepada kesimpulan yang benar adalah analisis data. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, yaitu melalui wawancara, pengamatan, dokumen, gambar dan sebagainya. Analisis data adalah proses menyusun data agar bisa ditafsirkan dan di simpulkan. Senada dengan itu, Patton dalam Moleong menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak peneliti berada di lapangan, yaitu sejak kegiatan pengumpulan data dilakukan sampai meninggalkan lapangan. Proses analisis data dilakukan sejak peneliti berada di lapangan. Proses ini dimulai dari kegiatan pengumpulan yang dilanjutkan dengan membuat reduksi data untuk memilih data yang sesuai. Hasil dari yang sudah direduksi disajikan dalam bentuk display data dan kemudian dibuat kesimpulan.

### **Ketetapan Pelajaran Agama sebagai Muatan Lokal di Madrasah Aliyah Al-Fatah Badas**

Sebagaimana paparan data di atas bahwa dari sejumlah informan yang menjadi subyek penelitian ini, baik yang berasal dari pihak pengelola Madrasah Aliyah Al-Fatah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, unsur pemerintahan desa dan sejumlah orang tua siswa menyatakan senang dan beranggapan penting pelajaran agama dijadikan sebagai muatan lokal di Madrasah Aliyah Al-Fatah. Dari semua unsur menyatakan bahwa agama tetap menjadi kebutuhan masyarakat sehingga perlu tetap dipertahankan dan dikembangkan pengajarannya.

#### **a. Kesesuaian Muatan Lokal dengan Pola Kehidupan Masyarakat.**

Kurikulum muatan lokal yang ada di madrasah Aliyah Al-Fatah Badas tertumpu pada pelajaran-pelajaran agama. Menurut keterangan yang di himpun oleh peneliti oleh sebagaimana yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa pelajaran agama memang menjadi kebutuhan masyarakat setempat mengingat adanya tradisi keagamaan di masyarakat yang kuat. Dari pendapat orang tua siswa maupun tokoh masyarakat menunjukkan adanya keterkaitan antara pelajaran agama yang di masukkan dalam kurikulum muatan lokal di Madrasah Aliyah dengan pola kehidupan masyarakat Badas dan sekitarnya. Kehidupan masyarakat Badas dan sekitarnya yang diwarnai dengan berbagai kegiatan keagamaan tersebut memerlukan kesinambungan yang terus menerus melalui program-program madrasah yang ditawarkan kepada masyarakat.

b. Kebutuhan Masyarakat tentang keterampilan Keagamaan

Dalam penelitian ini ditemukan adanya kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan ketrampilan keagamaan. Maksudnya adalah masyarakat tidak hanya sekedar perlu ilmu agama dalam tataran teori tetapi kebutuhan agama dalam tataran praktik. Sesuai data yang telah dipaparkan di atas melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sejumlah orang tua siswa disimpulkan adanya kebutuhan masyarakat tentang materi ketrampilan keagamaan yang biasa berlaku dimasyarakat dapat diajarkan kepada anak didik.

c. Kebutuhan Masyarakat Terhadap Keterampilan Kerja.

Dalam penelitian ini juga ditemukan adanya kebutuhan masyarakat terhadap keterampilan kerja. Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat

### III

#### **Kesimpulan**

Dari uraian di atas mulai dari paparan data, temuan penelitian yang dilanjutkan dengan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Penetapan pelajaran keagamaan oleh pihak pengelola Madrasah Al-Fatah yang di jadikan sebagai pelajaran muatan lokal didasarkan pada budaya dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan keterangan dari sejumlah informan yang terdiri dari beberapa pengurus yayasan Al-Fatah, Kepala sekolah dan Guru yang terlibat dalam penetapan kurikulum muatan lokal di MA Al-Fatah yang menunjukkan adanya pertimbangan menjadikan pelajaran agama sebagai muatan lokal.
2. Pelajaran muatan lokal yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat ditinjau dari segi pola kehidupan masyarakat yang ada. Dimana kehidupan masyarakat Badas dan sekitarnya yang agamis dengan berbagai kegiatan keagamaan telah mendapatkan respon dari Madrasah aliyah Al-Fatah Badas dengan menjadikan agama sebagai muatan lokal.
3. Dilihat dari perkembangan kebutuhan masyarakat masa kini dan masa mendatang, maka kurikulum muatan lokal yang berbasiskan pelajaran agama di Madrasah Aliyah Al-Fatah Badas tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini karena materi pelajaran muatan lokal yang diajarkan masih bersifat teoritis belum menyentuh secara langsung dengan kebiasaan ritual keagamaan yang berlaku di masyarakat dan juga belum menyiapkan anak didik memiliki keterampilan memimpin kegiatan keagamaan di masyarakat.

4. ]Kurikulum muatan lokal di Madrasah Aliyah Al-Fatah Badas belum memberikan keterampilan kerja sehingga kebutuhan dan harapan masyarakat tentang keterampilan kerja belum dapat terpenuhi.
5. Dalam penetapan atau penyusunan kurikulum muatan lokal di Madrasah Aliyah Al-Fatah Badas belum melibatkan masyarakat setempat atau masyarakat sekitar, baik dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pegawai pemeritahan desa maupun orang tua siswa. Penetapan kurikulum muatan lokal hanya ditetapkan oleh pihak Madrasah yang terdiri dari pengurus yayasan, kepala sekolah dan sebagian guru.
6. Dalam hal pelaksanaan kurikulum muatan lokal di Madrasah Aliyah Al-Fatah Badas terjadi beberapa kesenjangan, diantaranya belum adanya konsep kurikulum muatan lokal, belum adanya tujuan kurikulum muatan lokal yang jelas serta adanya pengurangan jam pelajaran yang ada pada kurikulum nasional. Selain itu dalam pelaksanaan di kelas guru kurang membuat persiapan mengajar sehingga kurang jelas pula tujuan yang ingin dicapai dalam pengajaran yang dilakukan, penggunaan metode yang kurang bervariasi, kurangnya penggunaan media untuk membantu dalam menjelaskan pelajaran dan kurang adanya evaluasi baik evaluasi terhadap kurikulum muatan lokal maupun evaluasi terhadap proses belajar mengajar selama berlangsung.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Hamalik, Oemar, 1982. *Pengajaran Unit Studi Kurikulum dan Metodologi*, Bandung, Alumni.
- , 1990. *Evaluasi Kurikulum*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- , 1999. *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Jalaluddin dan Usman Said,1997. *Filsafat Pendidikan Konsep dan Perkembangan Pemikirannya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Ixey J, 2000. *Metologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa.E, 1998. Karakteristik dan Implementasi Kurikulum muatan lokal dalam Kaitannya dengan Perkembangan Kebutuhan Masyarakat, *Ilmu Pendidikan*,XX (2) :179-189.
- Realita, Volume 1 No.1 Januari-Juni 2004

- Samani, Muchlas, 1999. *School Based Management: Strategi Pemberdayaan Sekolah Dalam Kerangka Desentralisasi Pendidikan Menuju Pendidikan yang Berkualitas*, Makalah dalam seminar nasional tentang formula manajemen pendidikan dalam kerangka otonomi daerah di bidang pendidikan, Universitas Negeri Malang, Malang 23 Agustus.
- Subandijah, 1992. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Muatan Lokal Di Sekolah Dasar Se Jawa Tengah, *Kependidikan*, XXII (1):30-39.
- Sudjana, Nana, 1996. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum, Jakarta di sekolah*, Bandung, Sinar Baru.
- Sukmadinata, Nana, Syaodih, 1988. *Prinsip dan Landasan Pengembangan Kurikulum*, Jakarta, Depdikbud, Dirjen Dikti, P2LPTK.
- Sutardi, Ambari, 1997. Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal SLTP di Propinsi Lampung, *Korpri*, 253 : 26-29
- Suwandi, 1994. Muatan Lokal : Menyusun dan Melaksanakannya di Daerah, *Suara Guru*, (9) : 11-13
- Syarif, Hamid, 1995. *Mengenal Kurikulum Sekolah dan Madrasah*, Bandung, Citra Umbara.
- Taba, Hida, 1962. *Curriculum Development : Theory and Practise*, New York, Harvourt Brace Jovanovivh, inc.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1989 tentang *Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya*, Semarang, Aneka Ilmu
- Undang-Undang *Otonomi Daerah* 1999, Bandung, Kuraiko Pratama
- Utomo, Erry, 1997. *Pokok-Pokok Pengertian dan Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal*, Jakarta, Depdikbud.
- Wahyu dkk, 1995. Pelaksanaan Dan Pengembangan Model Program Muatan Lokal Di Sekolah Dasar Negeri Kalimantan Selatan (Aplication and Development of Local Loaded Program Model In State Elementary School In South Kalimantan), *Kalimantan Scientiae*, XIII (35) : 35-45

